

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI
KECAMATAN KERTAPATI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DEA MAHARANI

NIM. 07011181621044

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Indralaya

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI
KECAMATAN KERTAPATI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**


Oleh:

**DEA MAHARANI
07011181621044**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Juli 2020


Pembimbing I

Drs. Mardianto
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



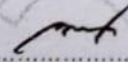
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Indralaya, 13 Agustus 2020

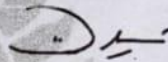
Ketua

1. Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001

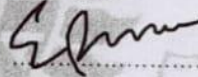


Anggota

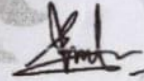
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



3. Dra. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



4. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

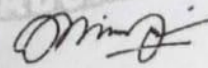


Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*Tidak ada kemenangan besar yang indah diceritakan
jika tidak ada kesulitan di dalamnya*

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

- ❖ *Kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku*
- ❖ *Kedua saudara kandungku yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya*
- ❖ *Keponakanku tersayang yang selalu memberikan energi positif untuk aunty*
- ❖ *Serta saudara dan sahabat sahabatku*
- ❖ *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga skripsi dengan judul “Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di kecamatan Kertapati Kota Palembang” yang merupakan tugas dan kewajiban guna untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan usulan penelitian ini dalam bentuk motivasi, saran, dan masukan sehingga laporan usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya, Bapak Alpian Supri dan Ibu Mety Suryana serta saudara saudara yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
2. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpuang, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan masukan dalam perkuliahan.
9. Seluruh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta bimbingannya.
10. Seluruh Dosen, Staff, Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
11. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya. Dengan segenap kerendahan hati penulismengharapkan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya, Agustus 2020

Dea Maharani

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa permasalahan pada Mekanisme penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni yang belum terlaksana dengan baik, dimana permasalahannya adalah terdapat ketidaksesuaian data yang tertera di BDT dengan keadaan yang ada dilapangan. Permasalahan yang selanjutnya adalah Kurangnya sosialisasi secara formal kepada masyarakat tentang program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kertapati kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan model teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn berdasarkan enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, hubungan antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi yang ditemui dilapangan. Saran untuk penelitian ini adalah untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman sebaiknya melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak yang terlibat mengenai data penerima bantuan agar data yang didapatkan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan dan bantuan tepat pada sasaran, dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar mengenai program rumah tidak layak huni agar masyarakat sekitar yang tidak menerima bantuan pun mengetahui program tersebut dan siapa yang berhak menerima bantuan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat sekitar dengan penerima bantuan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Rumah tidak layak huni.

Pembimbing I,



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II,



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Agustus 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research title is "Implementation of the Policy for Accelerating Poverty Reduction through the Unfit for Housing Program in Kertapati District, Palembang City." This research is motivated by the existence of several problems in the mechanism for determining the recipient of uninhabitable housing assistance that has not been implemented properly, where the problem is that there is a data mismatch listed in the BDT with the existing conditions in the field. The next problem is the lack of formal socialization to the community regarding the improper housing improvement program, which is marked by the community's ignorance of the application of the policy, resulting in the community's ignorance of who has the right to receive this assistance. This study aims to determine the implementation of policies for the acceleration of poverty alleviation in Kertapati district, Palembang city. The method used in this research is a descriptive qualitative method. This study uses the implementation theory model of Van Meter and Van Horn based on six indicators, namely size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, implementing attitudes, relationships between organizations, and the economic, social and political environment. The results of this study indicate that the achievement of the successful implementation of policies to accelerate poverty alleviation has been running quite well, but there are still several factors that influence the implementation process encountered in the field. Suggestions for this research are for the Public Housing and Residential Areas Service to better coordinate with the parties involved regarding the data on aid recipients so that the data obtained is by existing conditions in the field and assistance is right on target, and conducts socialization first with the community about the housing program unfit for habitation so that the surrounding community who did not receive assistance would know about the program and who was entitled to receive assistance. This was done so as not to create jealousy between the local community and the beneficiaries.

Keywords : *Implementation, Policy, House unfit for habitation.*

Advisor I,



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

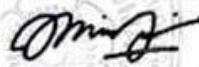
Advisor II,



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, August 2020

*Chairman of the state Administration Science Department
Faculty Of Social Science and Political Science
Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
3. Model Implementasi Kebijakan	14
4. Model Implementasi yang digunakan.....	17
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Definisi Konsep	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Unit Analisis Data	25
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Informan	27
G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Teknik Analisis Data	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum	31
1. Kota Palembang	31
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah	32
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota	

Palembang	32
B. Hasil dan Pembahasan.....	34
1. Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program Rumah tidak Layak Huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang	35
2. Analisis dan Interpretasi Data implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang	38
a. Ukuran dan Tujuan	38
b. Sumber daya	40
c. Karakteristik Agen Pelaksana.....	45
d. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana	49
e. Hubungan Antar Organisasi	50
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data masyarakat miskin (Pra sejahtera) yang ada di Kota Palembang tahun 2019	2
Tabel 1.2 Data masyarakat yang memperoleh bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Palembang	5
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	18
Tabel 3.1 Variabel Implementasi Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang	25
Tabel 4.1 Data 18 Kecamatan Kota Palembang dan Luas wilayah nya	31
Tabel 4.2 Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambaran publik yang mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati menurut Said Zainal Abidin.....	11
Gambar 2.2	Model pendekatan Van Meter dan Van Horn	15
Gambar 2.3	Model pendekatan Direct and indirect impact on implementation menurut GeorgeC. Edward III	16
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1	Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang	34
Gambar 4.2	Kondisi rumah sebelum mendapatkan bantuan program rumah tidak layak huni	36
Gambar 4.3	Kondisi rumah setelah mendapatkan bantuan program rumah tidak layak huni	37
Gambar 4.4	wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.....	39
Gambar 4.5	Wawancara dengan Bapak Andika Martadinata, S.T.MT selaku Kasi Perumahan swadaya.....	42
Gambar 4.6	Proses Pembuatan buku tabungan untuk pencairan dana Program rumah tidak layak huni	43
Gambar 4.7	Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.....	46
Gambar 4.8	Wawancara dengan Ibu Laili selaku penerima bantuan rumah tidak layak huni.....	48
Gambar 4.9	Kegiatan Sosialisasi untuk penerima bantuan program rumah tidak layak huni.....	51

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BDT	: Basis Data Terpadu
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BOS	: Bantuan Operasi Sekolah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dinsos	: Dinas Sosial
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PUPR RI	: Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RTLH	: Rumah Tidak Layah Huni
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
UPTD	: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik. Salah satu permasalahan bangsa yang mendesak saat ini adalah kemiskinan di mana diperlukan langkah-langkah penyelesaian dan penanganan yang tepat yaitu terpadu, tersusun dan secara keseluruhan. Penanganan permasalahan kemiskinan ini sangat diperlukan agar hak-hak dasar warga negara dapat terpenuhi secara layak melalui pembangunan yang menyeluruh, adil dan berkesinambungan sehingga terciptanya kehidupan yang bermanfaat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan. Campur tangan dari berbagai pihak ini diperlukan sebab satu daerah dengan daerah lain mengalami permasalahan kemiskinan yang berbeda ditinjau dari keadaan sosial dan keunikan daerah yang berbeda-beda pula di mana Pemerintah daerah dan masyarakat merupakan golongan yang dianggap sangat memahami hal tersebut serta kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Berikut adalah data masyarakat miskin (Pra sejahtera) yang ada di Kota Palembang sebanyak 18 Kecamatan tahun 2019 :

Tabel 1.1 Data masyarakat miskin (Pra sejahtera) yang ada di Kota Palembang tahun2019

No	Sumber Dana	Kelurahan	Kecamatan	Penerima Manfaat		Anggaran
				RT	Individu	
1.	APBD	Ilir Barat I	Bukit Lama	176	8.213	Rp 1.291.588.500
			26 Ilir I	-	3.165	Rp 32.368.500
			Lorok Pakjo	300	4.054	Rp 4.037.633.500
			Demang Lebar Daun	-	4.415	Rp 47.248.500
			Bukit Baru	75	3.703	Rp 95.904.750
			Siring Agung	-	6.132	Rp 128.061.000
2.	APBD	Ilir Barat II	27 Ilir	-	909	Rp 9.433.000
			28 Ilir	-	909	Rp 9.433.000
			29 Ilir	-	3.021	Rp 35.793.000
			30 Ilir	-	1.235	Rp 12.693.000
			32 Ilir	-	3.081	Rp 83.078.000
			35 Ilir	-	2.267	Rp 23.013.000
			Kemang Manis	-	1.268	Rp 13.023.000
3.	APBD	Ilir Timur I	13 Ilir	-	1.074	Rp 11.277.545
			14 Ilir	-	948	Rp 10.017.545
			15 Ilir	-	1.456	Rp 15.097.545
			16 Ilir	-	659	Rp 7.127.545
			17 Ilir	-	1.747	Rp 23.447.545
			18 Ilir	-	659	Rp 7.127.545
			20 Ilir I	30	6.231	Rp 120.182.545
			20 Ilir III	-	659	Rp 7.127.545
			20 Ilir IV	-	659	Rp 7.127.545
			Kepandean Baru	-	659	Rp 7.127.545
			Sei Pangeran	-	6.219	Rp 1.389.847.545
4.	APBD	Ilir Timur II	1 Ilir	-	1.616	Rp 17.781.166
			2 Ilir	15	4.630	Rp 75.272.416
			3 Ilir	176	2.366	Rp 1.225.281.166
			5 Ilir	-	1.375	Rp 15.371.166
			Sungai Buah	-	3.325	Rp 38.346.166
	APBN		Lawang Kidul	500	-	Rp 1.000.000.000
APBD	Kidul	-	1.375	Rp 15.371.166		
5.	APBD	Ilir Timur	8 Ilir	-	1.219	12.190.000
			9 Ilir	-	-	-
			10 Ilir	-	-	-
			11 Ilir	-	-	-

		III	Kuto Batu	-	790	Rp 7.900.000
			Duku	-	3.351	Rp 42.990.000
			19 Ilir	-	-	-
6.	APBD	Bukit Kecil	22 Ilir	-	882.640	Rp 2.279.052.000
			23 Ilir	176	670	Rp 1.206.700.000
			24 Ilir	-	2.366	Rp 28.370.000
			26 Ilir	-	1.162	Rp 11.620.000
	APBN APBD		Talang Semut	70.244	-	Rp 7.726.840.000
				-	150	Rp 125.000.000
7.	APBD	Sukarami	Sukabangun	-	2.530	Rp 25.300.000
			Sukajaya	-	4.550	Rp 50.225.000
			Sukarami	-	3.361	Rp 39.665.000
			Kebun Bunga	-	2.848	Rp 28.480.000
			Talang Betutu	-	5.083	Rp 62.895.000
			Sukodadi	-	2.126	Rp 21.260.000
			Talang Jambi	-	2.028	Rp 22.120.000
8.	APBD	Kemuning	20 Ilir II	-	1.024	Rp 10.240.000
			Sekip Jaya	-	1.258	Rp 12.580.000
			Pahlawan	30	1.725	Rp 49.050.000
			Pipa Reja	-	763	Rp 7.630.000
			Talang Aman	-	2.591	Rp 29.660.000
			Ario Kemuning	-	430	Rp 4.300.000
9.	APBD	Kalidoni	Sei Lais	200	541	Rp115.373.410.000
			Sei Selincah	-	4.177	Rp 49.550.000
			Sei Layur	-	2.287	Rp 22.870.000
			Kalidoni	-	4.197	Rp 50.380.000
			Bukit Sangkal	150	3.032	Rp 2.533.605.000
10.	APBD	Sako	Sukamaju	45	2.835	Rp 100.648.750
			Sialang	-	1.906	Rp 19.060.000
			Sako Baru	-	-	-
			Sako	-	6.975	Rp 82.560.000
11.	APBD	Sematang Borang	Lebong Gajah	-	1.456	Rp 14.560.000
			Srimulya	-	1.381	Rp 606.660.000
			Suka Mulya	150	668	Rp 704.710.000
			Karya Mulya	-	-	-
12.	APBD	Alang Alang Lebar	Sri Jaya	30	1.904	Rp 68.687.500
			Karya Baru	-	1.781	Rp 21.345.000
			Talang Kelapa	-	5.395	Rp 63.235.000
			Alang-	500	-	Rp 4.000.000.000

			Alang Lebar			
13.	APBN	Gandus	Pulo Kerto	200	-	Rp 466.000.000
	APBD			-	1.779	Rp 139.090.000
	APBN		Gandus	200	-	Rp 466.000.000
	APBD			15	1.979	Rp 750.356.250
	APBD		Karang Jaya	-	1.773	Rp 23.320.000
	APBN		Karang Anyar	-	200	Rp 2.822.135.550
	APBD			-	944	Rp 9.440.000
	ABPD		36 Ilir	-	1.862	Rp 21.735.000
14.	APBN	Kertapati	Karya Jaya	1.292	-	Rp 586.360.000
	APBD			-	2.025	Rp 26.250.000
	APBN		Keramasan	1.495	-	Rp 164.450.000
	APBD			-	3.648	Rp 45.060.000
	APBN		Kemang Agung	1.301	200	Rp 609.356.800
	APBD			-	4.270	Rp 50.700.000
	APBN		Kemas Rindo	858	-	Rp 94.380.000
	APBD			-	13.466	Rp 63.820.000
	APBN		Ogan Baru	2.254	-	Rp 247.940.000
	APBD			-	12.389	Rp 43.890.000
	APBN		Kertapati	735	-	Rp 80.850.000
	APBD			-	2.000	Rp 20.000.000
15.	APBD	Plaju	Plaju Darat	-	3.781	Rp 94.735.000
			Plaju Ulu	-	3.088	Rp 37.140.000
			Plaju Ilir	-	539	Rp 5.390.000
			Komperta	-	-	-
			Talang Putri	60	1.855	Rp 45.050.000
			Talang Bubuk	-	748	Rp 38.002.480.000
			Bagus Kuning	-	987	Rp 9.870.000
16.	APBD	Seberang Ulu I	1 Ulu	380	1.174	Rp 2.611.740.000
			2 Ulu	-	2.720	Rp 27.200.000
			3-4 Ulu	-	2.310	Rp 80.320.000
			7 Ulu	-	1.058	Rp 10.580.000
	APBN	5 Ulu	2.114	-	Rp 1.196.860.000	
	APBD		40	20.430	Rp 4.754.802.800	
	Swasta / Masyarakat		2	-	Rp 70.000.000.000	
17.	APBD	Seberang Ulu II	11 Ulu	-	-	-
			12 Ulu	-	54	Rp 98.840.000
			13 Ulu	-	54	Rp 49.590.000
			14 Ulu	-	919	Rp 9.190.000
			16 Ulu	50	13.449	Rp 937.565.000
			Tangga	90	1.110	Rp 100.475.000

			Takat			
			Sentosa	-	895	Rp 8.950.000
18.	APBD	Jakabaring	8 Ulu	-	-	-
			9-10 Ulu	-	1.376	Rp 13.760.000
			Tuan Kentang	-	2.320	Rp 27.670.000
			Silaberanti		4.121	Rp 50.135.000
			15 Ulu	200	-	Rp 466.000.000
	A PBN		-	3.653	Rp 40.815.000	
	APBD					

Sumber : Basis Data Terpadu Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang

Program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah untuk dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan. Program ini merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sebab pada dasarnya, seseorang akan lebih mendahulukan kepentingan perut dan pakaian daripada tempat berlindung yang sehat dan layak huni. Sehingga melalui program ini, pemerintah berharap dapat membantu kebutuhan wisma masyarakatnya.

Penanggulangan kemiskinan merupakan rencana yang diutamakan dalam masalah pembangunan oleh pemerintah kota/provinsi khususnya yang ada di kota Palembang. Demikian halnya dengan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, ditinjau dari banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan perlu dibantu dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Berikut adalah data masyarakat yang memperoleh bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang tahun 2018:

Tabel 1.2 Data masyarakat yang memperoleh bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang tahun 2018

No	Sumber Dana	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah	Anggaran
1	APBD	Kemang Agung	Kertapati	85 Unit	Rp. 3.000.000.000.00
2		Karya Jaya	Kertapati	102 Unit	Rp. 2.160.000.000.00
3		15 Ulu	Jakabaring	73 Unit	Rp. 1.920.000.000.00
4		Gandus	Gandus	54 Unit	Rp. 1.240.000.000.00
5		Pulokerto	Gandus	68 Unit	Rp. 1.800.000.000.00

		Total	Rp. 10.120.000.000.00
--	--	-------	-----------------------

Sumber : Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Palembang, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi bantuan dari APBD terbanyak pada tahun 2018 yaitu pada kecamatan Kertapati yaitu sebanyak 187 unit rumah di dua kelurahan yakni kelurahan kemang Agung dan Karya Jaya, dengan jumlah Anggaran sekitar Rp. 5.160.000.000.000.00 hal ini dikarenakan kecamatan Kertapati memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu dengan tingkat kepadatan 1.832 jiwa per km². Berdasarkan (BDT) Basis Data Terpadu jumlah penduduk kurang mampu di Palembang yaitu sekitar 108.000 Kepala keluarga atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Kota Palembang. Serta rendahnya ekonomi Masyarakat Kecamatan Kertapati menjadi salah satu alasan dalam menentukan jumlah alokasi bantuan Perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin dari pendataan yang telah dilakukan paling banyak ditemukan di kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kertapati.

Meskipun kebijakan mengenai program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut telah berjalan sejak tahun 2014 namun masih terdapat persoalan-persoalan yang sering muncul pada penerapannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Desmarita, ST selaku staff di bidang Perumahan yang meliputi :

1. Yakni permasalahan pada data, dimana data kemiskinan yang ada di Kota Palembang ini berpacu pada data pusat yang bisa disebut dengan BDT. Permasalahannya adalah ketidaksesuaian data yang tertera di BDT dengan keadaan yang ada di lapangan. Contohnya, pada data BDT si A membutuhkan bantuan namun kenyataan di lapangan si B lah sebenarnya yang layak untuk mendapatkan bantuan maka bantuan pun dialihkan ke si B. Karena pihak Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman memberikan bantuan sesuai dengan yang terlihat di lapangan agar bantuan tepat pada sasaran.

2. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat secara formal tentang program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pemerintah kota Palembang telah melibatkan diri dalam mengurangi angka kemiskinan dengan mengajak pihak swasta dan juga partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan yang baik adalah implementasi kebijakan yang berlandaskan strategi yang tepat, yang pemecahannya berkaitan dengan masyarakat dan wilayah tanpa menghilangkan struktur kekuasaan dan instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, oleh karena itu diperlukannya kajian mengenai Implementasi kebijakan mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di kecamatan Kota Palembang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di kecamatan Kertapati kota Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu Administrasi Negara terutama untuk kajian studi Implementasi Kebijakan. Penelitian ini melihat implementasi dari segi masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran kebijakan karena pada dasarnya proses implementasi kebijakan dilihat dari kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Manfaat praktis

Dapat mendiskripsikan mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Uddin & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar : CV SAH MEDIA
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk ilmu-ilmu sosial)*. Jakarta : Salemba Humanika
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik (panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial)*. Bandung : Alfabeta
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press Gorontalo
- Waldo, Dwight. 1996. *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1991. *Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Perundang-undangan :

- Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
- Undang undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin
- Pasal 1 ayat 7 UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan
- Peraturan Pemerintah PUPR No 8 Tahun 2020

Jurnal :

- Motic Deviano Novandric. 2015. Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan desa model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban) : Jawa Timur
- Iril Pahmi. 2013. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus program rumah tidak layak huni di Kabupaten Karimun). : Jawa Tengah
- Nadia Herwina. 2018. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kepulauan Riau

Internet :

Situs resmi SIDAK 2019.<http://www.sidak.palembang.go.id/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

Situs resmi Permen PUPR 2020.<http://www.pu.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020